

LAPORAN KINERJA CAMAT ROWOKANGKUNG



TRIWULAN II
2025

KECAMATAN
ROWOKANGKUNG
KABUPATEN
LUMAJANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang periode Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan Rowokangkung yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 3 (Tiga) bulan mulai April s.d. Juni 2025. Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Rowokangkung Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami berikutnya menjadi lebih baik.

Rowokangkung, 7 Juli 2025
CAMAT ROWOKANGKUNG,

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Camat berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Bupati. Adapun batasan laporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode triwulanan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaporan kinerja triwulanan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas kecamatan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai. Disamping itu, pelaporan kinerja juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025 adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas dalam kurun waktu April s.d. Juni 2025.

C. Gambaran Umum

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

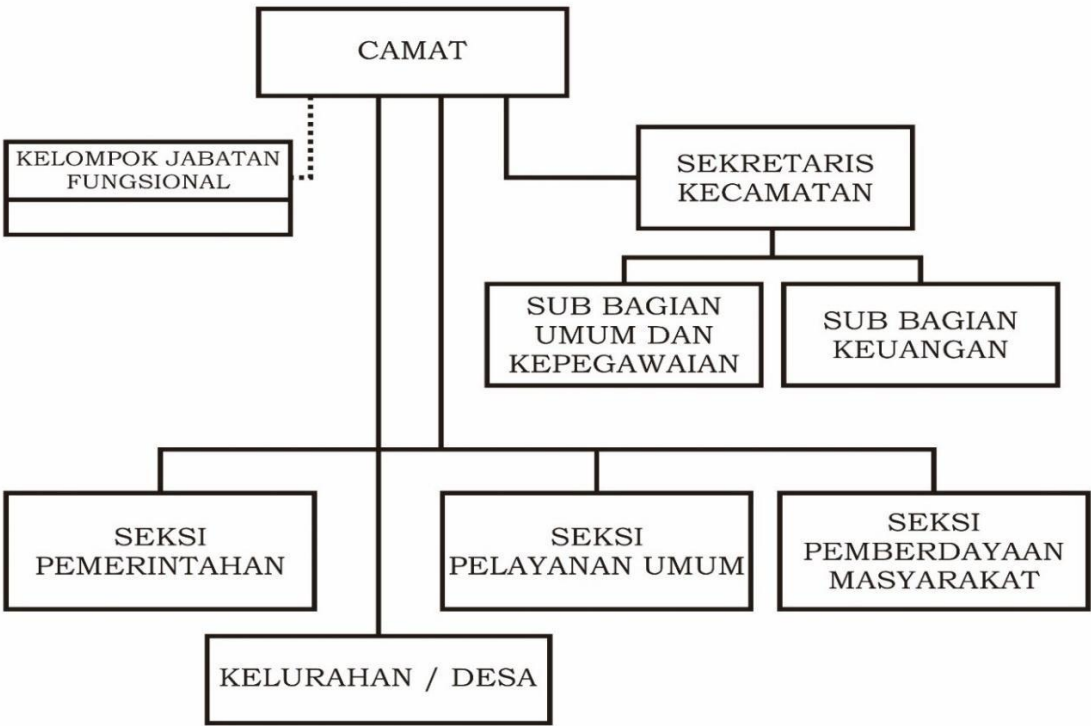
Kecamatan secara hierarki merupakan bawahan bupati sebagai perangkat daerah, maka kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan

di Kantor Kecamatan Rowokangkung menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Pelayanan Umum;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- 6. Lurah

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ROWOKANGKUNG
SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019**



Keterangan : Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Rowokangkung

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Tugas camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah membantu bupati dalam

mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan adnministrasi umum, kepegawaian, keuangan

perlengkapan dan keprotokolan;

4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
 - e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
 - f. Melakukan administrasi kepegawaian;
 - g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
 - i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
 - j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
2. Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Rowokangkung dengan indikator dan target yang terukur. Aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Kecamatan Lumajang, yakni Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dan Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa.

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rowokangkung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Menurunnya kondisi dan kurangnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal;
2. Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai tugas pokok dan fungsi;
3. Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah.

F. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar tentang Target Tujuan OPD (yang menyajikan uraian ringkas tujuan dan Target Tujuan tahun 2025) serta Perjanjian kinerja tahun 2025 (Menyajikan target kinerja pada dokumen PK di tahun 2025).

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

- Capaian Kinerja Tujuan & Sasaran Strategis Opd S/D Triwulan II Tahun 2025
- Capaian Kinerja Program Yang Menunjang Kinerja Sasaran Opd
- Penyajian Data Kinerja

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

- Analisa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja
- Analisa faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja
- Upaya / solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja
- Analisis efisiensi sumber daya
- Analisis program yang penunjang keberhasilan
- Realisasi anggaran (yang disajikan yaitu realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan)

BAB I : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN : Berisikan Dokumen PK dan Dokumen Kegiatan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN OPD

Targed Tujuan Kecamatan Rowokangkung merupakan pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis Kecamatan Rowokangkung yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Rowokangkung adalah sebagaimana table di bawah ini

Tabel 2.1
FORMULASI PERHITUNGAN KINERJA TUJUAN TAHUN 2025
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Penghitungan Kinerja
1	2	3	4	5
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Perhitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	79,08/B

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rowokangkung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
LEMBAR DOKUMEN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON III (CAMAT)KECAMATAN ROWOKANGKUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	85,50
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	79,30

Program					Anggaran	Sumber Dana
1.	Program	Penunjang	Urusan	Rp.	1.703.718.600,20,-	DAU
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2.	Program	Penyelenggaraan		Rp.	5.430.000,00,-	DAU
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
3.	Program	Pemberdayaan	Masyakat	Rp.	28.755.000,00,-	DAU
	Desa dan Kelurahan					
4.	Program	Penyelenggaraan	Urusan	Rp.	7.200.000,00,-	DAU
	Pemerintahan Umum					
5.	Program	Pembinaan	dan	Rp.	15.330.000,00,-	DAU
	Pengawasan Pemerintahan Desa					
JUMLAH				Rp.	1.760.433.600,20,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Rowokangkung

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Rowokangkung telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan Rowokangkung dilakukan dengan parameter penentuan keberhasilan

/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagai berikut:

Tabel 3.1
T-E.1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- 1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

B. CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS OPD
S/D TW II TAHUN 2025

Bahwa dalam melihat capaian kinerja tujuan meruakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis Kecamatan Rowokangkung , sedangkan Capaian kinerja Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Rowokangkung

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS OPD TRIWULAN II
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI SAAT INI
1.	Belum optimalnya Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Hasil survey kepuasan masyarakat	Indeks	79,08
			Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	Hasil survey kepuasan masyarakat	%	79,08
				2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Hasil Penilaian Sinergitas Kecamatan	%	66,66

Tabel 3.3

C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
A	Terpenuhinya Fasilitas Adminitrasi keuangan dan Kebutuhan Operasional Kantor	Prosentase Pemenuhan Fasilitas Adminitrasi keuangan dan Kebutuhan Operasional Kantor	100	54,14	54,14	1.703.718.600,20	871.620.831	51,,63	0
B	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100	9,12	16,34	5.430.000	495.000	9,12	0
C	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100	31,82	31,82	28.755.000	9.150.000	31,82	0
D	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	1	7.200.000	3.000.000	41,67	0
E	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	-	-	15.330.000	0	0.	0
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100	-	-				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100	100	1				

Tabel 3.4
D. PENYAJIAN DATA KINERJA DALAM BENTUK
PENGUKURAN KINERJA ESELON III
TRIWULAN II TAHUN 2025

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW II TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 %
	1	2	3	4	5=4/3
CAMAT					
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	85,50	79,08	92,49
2		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	79,30	66.66	84,06

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan II (Dua) tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa 2 (Dua) Indikator kinerja Kecamatan Rowokangkung telah tercapai dengan tingkatan efisiensi yang baik.

1. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

a. Indikator Tujuan

- Tetap memberikan pelayanan yang maksimal dengan memperhatikan atau memahami alasan masyarakat melakukan pengurusan adminduk melalui calo;
- Kerjasama yang baik dalam memberikan pengertian secara lisan (saat melaksanakan rakor) ataupun online kepada setiap masyarakat dalam pentingnya dokumen adminduk
- Memaksimalkan pemeliharaan dengan menerapkan skala prioritas
- Koordinasi yang baik antara masyarakat, dan pemberi jasa pelayanan (Kecamatan, Dinas Sosial, dan DISDUKCAPIL)

b. Indikator Sasaran

- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , TPD /Korcam dan Perangkat Desa
- Kerjasama yang baik dari masing masing personil di Kecamatan Lumajang
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , dan Kelurahan
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , Desa dan Kelurahan

2. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

a. Indikator Tujuan

- Masih adanya biro jasa pengurusan adminduk di Kecamatan (calo)
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk
- Sarana prasarana Kecamatan yang masih belum optimal
- Birokrasi yang terlalu panjang dan terkesan berbelit .

b. Indikator Sasaran

- Masih terbatasnya SDM Desa yang menguasai bidang administrasi Desa khususnya pembangunan fisik
- Masih kurangnya SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Masih belum kooperatif nya Kepala Desa dan Perangkat dalam pelaporan administrasi desa khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB)
- Masih belum adanya integrasi pada pelaporan aset dan keuangan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan (masih perekapan secara manual)
- Masih ada desa yang harus selalu diberikan peringatan untuk segera melaksanakan pelaporan administrasi Desa secara tepat waktu.

3. UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schedule yang sudah di tentukan
- Camat melalui Korcam dan TPD untuk selalu mengingatkan dan memberikan deadline kepada setiap Desa dalam masa pelaporan administrasi Desa

4. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian anggaran pada Triwulan I. Analisis tersebut ditunjukkan dalam Lampiran

5. ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	50	Memaksimalkan sarana prasarana yang ada dengan baik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan k Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	50,43	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat Kecamatan, Perangkat Daerah sampai masyarakat
3	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100	Terpenuhinya Adminitrasi keuangan dan Kebutuhan Operasional Kantor
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	Kerjasama dan koordinasi yang sinergi
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	0	Koordinasi, fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan kepada desa
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	0	Komitmen dari semua pihak baik tingkat Kecamatan dan Desa
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100	Komitmen dari semua pihak baik tingkat Kecamatan dan Desa

..

6. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Triwulan II tahun 2025 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan-kegiatan, jumlah dana, dan pengeluaran dana yang dilakukan Kecamatan Rowokangkung disajikan dalam tabel berikut :

Realisasi Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah aerah Kabupaten/Kota	1.703.718.600,20	871.620.831	51,63
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.430.000	495.000	9,12
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	28.755.000	9.150.000	31,82
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	3.000.000	41,67
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.330.000	0	0
	JUMLAH	1.760.433.600,20	884.265.831	50,67

BAB I PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kecamatan Rowokangkung telah dapat melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Pencapaian sasaran dalam triwulan II tahun 2025 sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2025-2026.

Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan triwulan berikutnya. Laporan kinerja triwulanan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan pada periode berikutnya sangat kami harapkan.

Rowokangkung, 7 Juli 2025
CAMAT ROWOKANGKUNG,

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
NIP: 19771006 201001 2 009

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD / Indikator Tujuan Perangkat Daerah

a. Indikator : Indeks Pelayanan Publik

b. Target Kinerja : C (53,5)

c. Realisasi Kinerja : -

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja	Target Periode Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Predikat Capaian Kinerja Tahun 2025 (Tabel TE-1)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Permasalahan yang menghambat Capaian Kinerja dan Penjelasan terhadap kinerja melebihi capaian (Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab								
											I		II		III		IV																					
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15	16 = 13		17 = 16/6 x 100%		18	19	20			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp											
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang di tindak lanjut	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang di tindak lanjut dibagi jumlah fasilitasi dan koordinasi dikali 100	95,83	%																								Kec. Rowokangkung								
	Meningkatnya akurabilitas Pemerintahan Desa		Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu-Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu-Jumlah Desa yang menyusun LPDesa tepat waktu) dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan	100	%																																
7.01.01	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100	%	5,323,596,461	100	%	1,624,829,045	100	%	1,688,262,541	17	%	424,562,098	34	%	447,058,763	%	-	%	-	50.41	%	871,620,861	50.41	%	51.63	Sangat Rendah	50.41	%	871,620,861	50.41	16.4	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Subag umum dan Keuangan
7.01.01.201	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan penganggaran kinerja perangkat daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan penganggaran kinerja perangkat daerah yang direncanakan dikali 100	100	%	31,114,000	100	%	47,000	100	%	10,861,000	-	%	-	67	%	-	-	%	-	66.67	0.00	Sedang	67	%	-	67	0.0	Keterbatasan SDM	Memaksimalkan SDM yang ada dengan memberikan tugas tambahan	Kasubag Keuangan					
7.01.01.201.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dok	13,981,440	-	-	-	3	dok	4,068,000	dok	-	3	dok	-	-	dok	-	3	lap	-	100.0	-	Sangat Tinggi	3	dok	-	43	0.0	Keterbatasan SDM	Memaksimalkan SDM yang ada dengan memberikan tugas tambahan				
7.01.01.201.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dok	11,015,680	-	-	-	1	dok	4,690,000	dok	-	dok	-	dok	-	-	dok	-	-	dok	-	Sangat Rendah	-	dok	-	0	0.0	Keterbatasan SDM	Memaksimalkan SDM yang ada dengan memberikan tugas tambahan					
7.01.01.201.000	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Kritisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kritisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kritisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kritisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kritisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kritisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kritisar Realisasi Kinerja SKPD	15	lap	6,116,880	5	lap	47,000	5	lap	2,103,000	lap	-	3	lap	-	lap	-	3	dok	-	60.0	-	Rendah	3	lap	-	20	0.0	Keterbatasan SDM	Memaksimalkan SDM yang ada dengan memberikan tugas tambahan					
7.01.01.202	Terpenuhinya fasilitasi Administrasi keuangan Perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah yang direncanakan dikali 100	100	%	4,256,572,949	100	%	1,342,652,098	100	%	1,405,277,255	62.50	%	385,968,095	8.33	%	385,164,868	%	-	%	-	70.83	%	771,132,963	70.83	%	54.87	Sedang	70.83	%	771,132,963	71	18.1	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Kasubag Keuangan
7.01.01.202.000	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN/ Bulan	13	orang/bn	4,179,079,229	12	orang/bn	1,319,240,098	12	orang/bn	1,381,865,255	12	orang/bn	380,115,095	12	orang/bn	381,262,868	orang/bn		12	orang/bn	761,377,963	100.0	55.1	Sangat Tinggi	12	orang/bn	761,377,963	92	18.2	Adanya kenaikan berkala Pegawai PNS sehingga penyerapan tidak sesuai dengan yang direncanakan	Melaksanakan rekon Gaji dan menghitung jumlah PNS yang mengalami kenaikan berkala				
7.01.01.202.000	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	dok	77,493,720	12	dok	23,412,000	12	dok	23,412,000	3	dok	5,853,000	2	dok	3,902,000	dok		5	dok	9,755,000	41.7	41.7	Sangat Rendah	5	dok	9,755,000	14	12.6	Keterbatasan SDM	Memaksimalkan SDM yang ada dengan memberikan tugas tambahan				
7.01.01.203	Terpenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali	100	%	6,620,000	100	%	1,800,000	100	%	1,200,000	-	%	-	42	%	-	%	-	%	-	42	%	-	41.67	0.00	Sangat Rendah	42	%	-	42	0.0	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Kasubag Umum dan KePegawaian	
7.01.01.203.000	Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	lap	6,620,000	12	lap	1,800,000	12	lap	1,200,000	lap		5	lap		lap		5	lap	-	41.7	-	Sangat Rendah	5	lap	-	14	0.0	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan					
7.01.01.206	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali	100	%	260,901,256	100		62,412,190	100	%	35,480,486	7	%	1,758,350	41	%	10,405,386	%	-	%	-	48	%	12,163,736	48.28	34.28	Sangat Rendah	48	%	12,163,736	48	4.7	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Kasubag Umum dan KePegawaian	

7.01.01.206.000	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	11,763,740	1 paket	2,834,940	1 paket	1,557,600	1 paket	1,557,600	- paket	-	- paket	-	- pak et	-	1 pak et	1,557,600	100.0	100.0	Sangat Tinggi	1 pak et	1,557,600	33	13.2	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	
7.01.01.206.000	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12 paket	80,755,248	3 paket	21,446,500	3 paket	7,185,386	- paket	-	3 paket	7,185,386	- paket	-	- pak et	-	3 pak et	7,185,386	100.0	100.0	Sangat Tinggi	3 pak et	7,185,386	25	8.9	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	
7.01.01.206.000	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	9 paket	21,280,784	1 paket	2,000,750	1 paket	1,411,500	1 paket	200,750	- paket	-	- paket	-	- pak et	-	1 pak et	200,750	100.0	14.2	Sangat Tinggi	1 pak et	200,750	11	0.9	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	
7.01.01.206.000	Tertaksananya Fasilitas Kurungan Tamu	Tertaksananya Fasilitas Kurungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tamu	36 lap	19,860,000	12 lap	3,000,000	12 lap	3,000,000	- lap	-	4 lap	-	0 lap	-	0 lap	0	4 lap	-	33.3	-	Sangat Rendah	4 lap	-	11	0.0	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	
7.01.01.206.000	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 lap	127,241,484	12 lap	33,130,000	12 lap	22,326,000	- lap	-	5 lap	3,220,000	0 lap	-	- lap	-	5 lap	3,220,000	41.7	14.4	Sangat Rendah	5 lap	3,220,000	14	2.5	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	
7.01.01.208	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100	100 %	627,713,256	100 %	185,235,257	100 %	189,888,000	25 %	32,115,633	25 %	46,768,509	%	-	%	50 %	78,884,162	50.00	41.54	Sangat Rendah	50 %	78,884,162	50	12.6	Belum optimalnya perencanaan di kecamatan	Optimalisasi Sdm yang ada di Kecamatan	Kasubag Umum dan KePegawain	
7.01.01.208.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 lap	56,601,000	12 lap	15,606,428	12 lap	16,200,000	3 lap	3,871,860	3 lap	2,888,526	0 lap	-	- lap	-	6 lap	6,760,386	50.0	41.7	Sangat Rendah	6 lap	6,760,386	17	11.9	adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	melakukan koordinasi dan evaluasi dengan para pimpinan	
7.01.01.208.000	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 lap	571,112,256	12 lap	169,628,829	12 lap	173,688,000	3 lap	28,243,793	3 lap	43,879,983	0 lap	-	- lap	-	6 lap	72,123,776	50.0	41.5	Sangat Rendah	6 lap	72,123,776	17	12.6	adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	melakukan koordinasi dan evaluasi dengan para pimpinan	
7.01.01.209	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100	100 %	140,675,000	100 %	32,682,500	100 %	45,555,800	5.00 %	4,720,000	20.00 %	4,720,000	- %	-	%	25 %	9,440,000	25.00	20.72	Sangat Rendah	25 %	9,440,000	25	6.7	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Kasubag Umum dan KePegawain	
7.01.01.209.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unti Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Perizinan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	115,850,000	6 unit	27,082,500	6 unit	38,855,800	1 unit	4,720,000	- unit	4,720,000	- unit	-	- unit	-	1 unit	9,440,000	16.7	24.3	Sangat Rendah	1 unit	9,440,000	6	8.1	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	
7.01.01.209.000	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	24,825,000	9 unit	5,600,000	14 unit	6,700,000	- unit	-	4 unit	-	- unit	-	- unit	0	4 unit	-	28.6	-	Sangat Rendah	4 unit	-	10	0.0	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	
7.01.02	Terpenuhinya pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100	100 %	30,327,895	100 %	9,495,000	100 %	5,438,000	- %	-	50.0 %	495,000	%	-	%	50.0 %	495,000	50.0	9.1	Sangat Rendah	50 %	495,000	50.00	1.6	Terbatasnya sarana dan prasarana Kecamatan	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Kasi Pelayanan Umum	
7.01.02.201	terfasilitasinya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100	100 %	13,240,000	100 %	2,400,000	100 %	2,400,000	- %	-	50 %	-	%	-	%	50 %	-	50.0	-	Sangat Rendah	50 %	-	50	0.0	Terbatasnya sarana dan prasarana Kecamatan	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Kasi Pelayanan Umum	
7.01.02.201.000	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dok	13,240,000	1 dok	2,400,000	2 dok	2,400,000	- dok	-	1 dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	-	50.0	-	Sangat Rendah	1 dok	-	17	0.0	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	
7.01.02.204	terfasilitasinya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilmphahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilmphahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilmphahkan kepada Camat	Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilmphahkan kepada Camat yang dilaksanakan dibagi Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilmphahkan kepada Camat dikali 100	100 %	17,087,895	N/A	N/A	100 %	3,030,000	- %	-	50.00 %	495,000	%	-	%	-	50 %	495,000	50.0	16.3	Sangat Rendah	50 %	495,000	50	2.9	Terbatasnya sarana dan prasarana Kecamatan	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Kasi Pelayanan Umum
7.01.02.204.000	Tertaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilmphahkan	Tertaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilmphahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilmphahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilmphahkan	18 lap	17,087,895	N/A	N/A	6 lap	3,030,000	- lap	-	3 lap	495,000	- lap	-	- lap	-	3 lap	495,000	50.0	16.3	Sangat Rendah	3 lap	495,000	17	2.9	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	

7:01:03	Terpenuhinya fasilitas pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah (persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2	100 %	497,665,740	100 %	=VALUE!	100 %	28,755,000	4.55 %	6,300,000	45.88 %	2,850,000	%	-	%	-	50.43 %	9,150,000	50.43	31.8	Sangat Rendah	50 %	9,150,000	50.43	1.8	kegiatan fasilitasi tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Kasi Pemberdayaan
7:01.03.201	Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyrakat desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100	100 %	466,867,125	100 %	21,755,000	100 %	16,155,000	9.09 %	6,300,000	63.64 %	1,230,000	%	-	%	-	72.73 %	7,530,000	72.7	46.6	Sedang	73 %	7,530,000	73	1.6	kegiatan fasilitasi tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Kasi Pemberdayaan
7:01.03.201.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasayarakatan	9,750,000	5 lembaga kemasayarakatan	1,050,000	6 lembaga kemasayarakatan	1,050,000		-	6 lembaga kemasayarakatan	-	lembaga kemasayarakatan	-	lembaga kemasayarakatan	-	6 lembaga kemasayarakatan	-	100.0	-	Sangat Tinggi	6 lembaga kemasayarakatan	-	40	0.0	Kurang Terjalarnya koordinasi dan kerja sama dengan para pihak terkait sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan	koordinasi dan kerja sama yang baik dengan para pihak terkait sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan	
7:01.03.201.000.0	Terselenggaranya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	3 dok	22,225,000	1 dok	7,175,000	1 dok	6,900,000	1 dok	6,300,000	- dok	600,000	- dok	-	- dok	-	1 dok	6,900,000	100.0	100.0	Sangat Tinggi	1 dok	6,900,000	33	31.0	Telah dilaksanakan	koordinasi dan kerja sama yang baik dengan para pihak terkait sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan	
7:01.03.201.000.0	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 lap	434,892,125	3 lap	13,530,000	4 lap	8,205,000	- lap	-	1 lap	630,000	- lap	-	- lap	-	1 lap	630,000	25.0	7.7	Sangat Rendah	1 lap	630,000	4	0.1	kegiatan fasilitasi tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dan mengukulkan usulan sesuai prioritas kebutuhan	
7:01.03.206	terfasilitasinya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100	100 %	30,798,615	N/A	N/A	100 %	12,600,000	- %	-	28 %	1,620,000	%	-	%	-	28 %	1,620,000	28.1	12.9	Sangat Rendah	28 %	1,620,000	28	5.3	Kurang Terjalarnya koordinasi dan kerja sama dengan para pihak terkait sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan harapan	koordinasi dan kerja sama yang baik dengan para pihak terkait sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan	Kasi Pemberdayaan
7:01.03.206.000	Terselenggaranya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	384 keluarga	30,798,615	N/A	N/A	128 keluarga	12,600,000	- keluarga	-	36 keluarga	1,620,000	- keluarga	-	- keluarga	-	36 keluarga	1,620,000	28.1	12.9	Sangat Rendah	36 keluarga	1,620,000	9	5.3	Kurang Terjalarnya koordinasi dan kerja sama dengan para pihak terkait sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan	koordinasi dan kerja sama yang baik dengan para pihak terkait sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan	
7:01:05	Terpenuhinya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100	100 %	23,832,000	N/A	N/A	100 %	7,200,000	25 %	1,800,000	42 %	1,200,000	%	-	%	-	67 %	3,000,000	66.7	41.7	Sedang	67 %	3,000,000	66.67	12.6	Masih adanya gangguan TRANTIBUM	Peningkatan volume patroli Bersama	Kasi Pemerintahan
7:01.05.201	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengutusan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	3 fasilitas	23,832,000	N/A	N/A	1 fasilitas	7,200,000	1 fasilitas	1,800,000	1 fasilitas	1,200,000	- fasilitas	-	- fasilitas	-	1 fasilitas	3,000,000	100.0	41.7	Sangat Tinggi	1 fasilitas	3,000,000	33	12.6	Masih adanya gangguan TRANTIBUM	Peningkatan volume patroli Bersama	Kasi Pemerintahan

[illegible]



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NIRA FITRI AVIANA, S.Sos**

Jabatan : **CAMAT ROWOKANGKUNG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir.Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.**

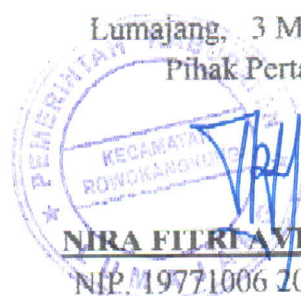
Jabatan : **BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua.
Ir.Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.

Lumajang, 3 Maret 2025
Pihak Pertama,

NIRA FITRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	85,50
2		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	79,30

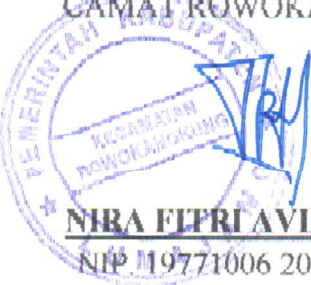
	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp.	1.703.718.600,20,-	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp.	5.430.000,00,-	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp.	28.755.000,00,-	DAU
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp.	7.200.000,00,-	DAU
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp.	15.330.000,00,-	DAU
	JUMLAH	Rp. 1.760.433.600,20,-	

BUPATI LUMAJANG

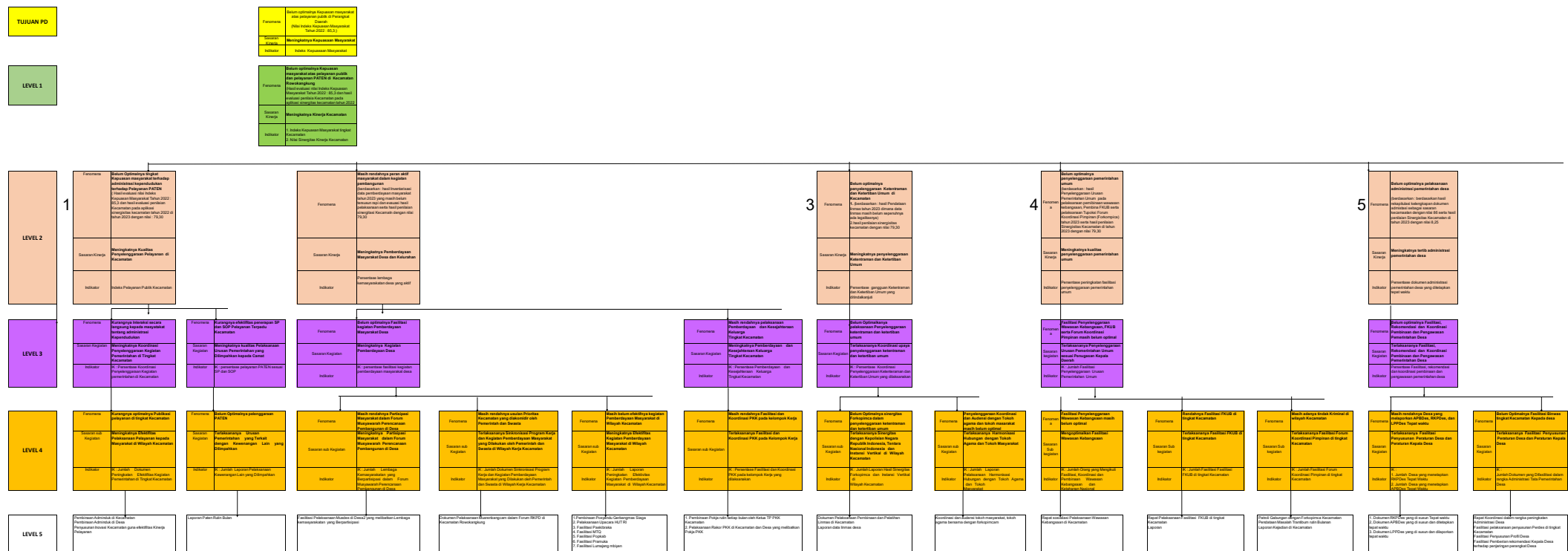


Ir.Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.

Lumajang, 3 Maret 2025
CAMAT ROWOKANGKUNG



NIRA FILPRI AVIANA, S.Sos
NIP. 19771006 201001 2 009



REKAPITULASI REALISASI KINERJA KEGIATAN TRIBULAN I TAHUN 2025 (SASARAN IKU I)																
Kode	IKU/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Realisasi Trib. I		Capain (%)	Realisasi Trib. II		Capain (%)	Realisasi Trib. III		Capain (%)	Realisasi Trib. IV		Capain (%)
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan	
	Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96,83	%	26,33	%	27,19%	44,79	%	46,25%						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100,00	%	30,32	%	30,32%	54,14	%	54,14%						
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100,00	%	44,44	%	44,44%	55,56	%	55,56%						
7.01.01.201.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	1	dokumen	33,33%	2	dokumen	66,67%						
7.01.01.201.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	0	dokumen	0,00%	0	dokumen	0,00%						
7.01.01.201.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	5	laporan	100,00%	5	laporan	100,00%						
7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	%	25,00	%	25,00%	50,00	%	50,00%						
7.01.01.202.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	dokumen	3	dokumen	25,00%	6	dokumen	50,00%						
7.01.01.202.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	3	dokumen	25,00%	6	dokumen	50,00%						
7.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100,00	%	25,00	%	25,00%	50,00	%	50,00%						
7.01.01.203.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	3	laporan	25,00%	6	laporan	50,00%						
7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100,00	%	25,00	%	25,00%	80,00	%	80,00%						
7.01.01.206.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	100,00%	1	paket	100,00%						
7.01.01.206.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	0	paket	0,00%	3	paket	100,00%						
7.01.01.206.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	0	paket	0,00%	1	paket	100,00%						
7.01.01.206.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	3	laporan	25,00%	6	laporan	50,00%						

7.01.01.206.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	3	laporan	25,00%	6	laporan	50,00%						
7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	62,50	%	62,50%	75,00	%	75,00%						
7.01.01.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	paket	1	laporan	100,00%	1	laporan	100,00%						
7.01.01.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	3	laporan	25,00%	6	laporan	50,00%						
7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	%	0,00	%	0,00%	14,29	%	14,29%						
7.01.01.209.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	unit	0	unit	0,00%	0	unit	0,00%						
7.01.01.209.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	unit	0	unit	0,00%	4	unit	28,57%						
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100,00	%	8,33	%	8,33%	25,00	%	25,00%						
7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100,00	%	0,00	%	0,00%	0,00	%	0,00%						
7.01.02.201.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	dokumen	0	dokumen	0,00%	0	dokumen	0,00%						
7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00	%	16,67	%	16,67%	50,00	%	50,00%						
7.01.02.204.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	laporan	1	laporan	16,67%	3	laporan	50,00%						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	%	16,67	%	16,67%	50,00	%	50,00%						
7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100,00	%	33,33	%	33,33%	50,00	%	50,00%						

7.01.03.201.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	lembaga Kemasyarakatan	0	lembaga Kemasyarakatan	0,00%	0	lembaga Kemasyarakatan	0,00%						
7.01.03.201.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	1	dokumen	100,00%						
7.01.03.201.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	0	laporan	0,00%	2	laporan	50,00%						
7.01.03.206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100,00	%	0,00	%	0,00%	50,00	%	50,00%						
7.01.03.206.0001	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	128	keluarga	0	keluarga	0,00%	64	keluarga	50,00%						
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	%	50,00	%	50,00%	50,00	%	50,00%						
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,00	fasilitasi	0,50	fasilitasi	50,00%	0,50	fasilitasi	50,00%						
7.01.05.201.0008	Pelaksanaan Tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	dokumen	6	dokumen	50,00%	6	dokumen	50,00%						

Rowokangkung, 2 Juli 2025

CAMAT ROWOKANGKUNG,



NIRN FITRI AVIANA, S.Sos

NIP. 19771006 201001 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 3 Juli 2025

Nomor : 000.8.3.4/45/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 1 Tahun 2025

Yth. Camat Rowokangkung
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/427.16/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 1 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Versi Permenpan RB : 79.08
 - b. Versi Pedoman MCP KPK : 80.15
4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 5, yaitu: 1) Waktu Pelayanan, 2) Biaya/Tarif, 3) Produk Pelayanan, 4) Penanganan Pengaduan dan 5) Sarana dan Prasarana
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 4, yaitu : 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Prosedur Pelayanan, 3) Kompetensi

Pelaksana, dan 4) Perilaku Pelaksana.

Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.

5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, ada 2 (dua) yaitu : 1) “Tempat parkir yang kurang memadai”, 2) “Tolong lebih di tingkatkan untuk pelayanan dan memberi pemahaman dalam mengurus suatu perkara ketika ada warga yang bertanya bukanya malah jengkel dengan pemahaman warga yang kurang”.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 1, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2024 (Semester 2 tahun 2024)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Senin tanggal 7 Juli 2025** melalui <https://tinyurl.com/LapSKM2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan sebagaimana pada link dimaksud dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.
5. Mengimplementasikan Buku Tamu Online dengan mempublikasikan link buku tamu online tersebut pada setiap meja di ruang unit pelayanan/ meja *front office*. Nantinya data pengguna layanan yang masuk akan langsung digunakan sebagai data sampel responden pada pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 oleh Bagian Organisasi. Adapun Buku Tamu Online pada masing-masing UP3 dapat diunduh pada link berikut : <https://tinyurl.com/BUKU-TAMU-Kec-Rowokangkung>.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agl

Tembusan:
Bupati Lumajang.

DOKUMENTASI KEGIATAN CAMAT ROWOKANGKUNG



RAKOR PKK



POKMAS





